

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Terselenggaranya Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (*Good Governance and Clean Government*) merupakan prasyarat bagi setiap Pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara, sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan *legitimate* agar penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Fungsi pemerintahan tersebut akan dapat terselenggara dengan baik apabila terwujudnya *good governance*.

Salah satu pilar *good governance* adalah akuntabilitas. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menjelaskan bahwa akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Ini berarti bahwa akuntabilitas berkaitan dengan pelaksanaan evaluasi (penilaian) mengenai standar pelaksanaan kegiatan, apakah standar yang dibuat sudah tepat dengan situasi dan kondisi yang dihadapi, dan apabila dirasa sudah tepat, manajemen memiliki tanggung jawab untuk mengimplementasikan standar-standar tersebut.

Akuntabilitas juga merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik. Dalam hubungan ini, diperlukan evaluasi kinerja yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian hasil serta cara-cara yang digunakan untuk mencapai semua itu. Pengendalian (*control*) sebagai



bagian penting dalam manajemen yang baik adalah hal yang saling menunjang dengan akuntabilitas. Dengan kata lain pengendalian tidak dapat berjalan efisien dan efektif bila tidak ditunjang dengan mekanisme akuntabilitas yang baik demikian juga sebaliknya. Media akuntabilitas yang memadai dapat berbentuk laporan yang dapat mengekspresikan pencapaian tujuan melalui pengelolaan sumber daya suatu organisasi, karena pencapaian tujuan merupakan salah satu ukuran kinerja individu maupun unit organisasi. Tujuan tersebut dapat dilihat dalam Renstra organisasi, Rencana Kinerja Tahunan, dan Penetapan Kinerja, dengan tetap berpegangan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kabupaten Bogor adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Bogor dalam pelaksanaan setiap *sasaran strategis* yang telah ditetapkan. Dalam perspektif yang lain LAKIP merupakan alat kendali, penilai kinerja secara kuantitatif dan sebagai wujud transparansi pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah dalam rangka menuju perwujudan *Good Governance*, atau sebagai media pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Bogor terhadap masyarakat Kabupaten Bogor.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2013 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah Kepemerintahan yang baik bersih dan berwibawa (*Good Governance and Clean Government*) di Indonesia.

LAKIP Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2013 ini berisikan mengenai pencapaian sasaran strategis dalam RPJMD berikut indikator kerjanya, penjelasan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja, serta memuat perbandingan pencapaian kinerja.



Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kabupaten Bogor mengacu pada:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
9. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;



13. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 16 tahun 2011 tentang Perubahan Perda Nomor 7 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2008-2013;
16. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tanggal 10 Januari 2013 tentang Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor Tahun 2013;
17. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tanggal 01 November 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2013.

## **1.2 Organisasi Pemerintah Kabupaten Bogor**

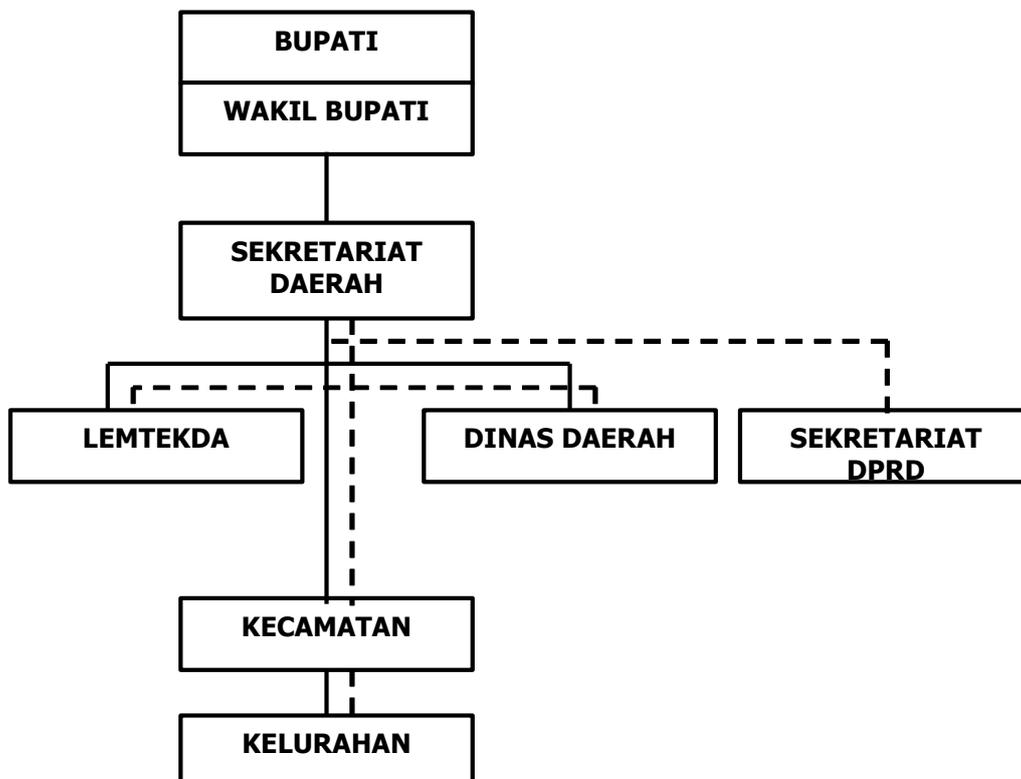
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 14 ayat (1) bahwa urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota meliputi Perencanaan dan pengendalian pembangunan; Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang; Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; Penyediaan sarana dan prasarana umum; Penanganan bidang kesehatan; Penyelenggaraan pendidikan; Penanggulangan masalah sosial; Pelayanan bidang ketenagakerjaan; Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah; Pengendalian lingkungan hidup; Pelayanan pertanahan; Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil; Pelayanan administrasi umum pemerintahan; Pelayanan administrasi penanaman modal; Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan tersebut, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bogor. Perangkat Daerah Kabupaten Bogor terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah.



Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor adalah unsur staf Pemerintah Kabupaten Bogor dalam pelaksanaan perumusan kebijakan teknis operasional, sedangkan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bogor adalah unsur penunjang Pemerintah Kabupaten Bogor, baik sebagai unit staf maupun unit lini yang terdiri dari Badan dan Kantor. Dinas Daerah Kabupaten Bogor adalah unsur pelaksana pemerintah daerah Kabupaten Bogor yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Selain itu, kecamatan dalam wilayah Kabupaten Bogor merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Bogor yang dipimpin oleh Kepala Kecamatan yang disebut Camat, sementara kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dipimpin oleh Kepala Kelurahan yang disebut Lurah. Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Bogor disajikan dalam gambar 1.1 berikut ini:

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bogor (Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 tahun 2008)



Kedudukan, tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah Kabupaten Bogor adalah sebagai berikut:

### 1. Bupati/ Wakil Bupati



Bupati Bogor mempunyai kewajiban: (1) Mempertahankan dan memelihara ketentraman Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai cita-cita Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945; (2) Memegang teguh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; (3) Menghormati kedaulatan rakyat; (4) Menegakan seluruh peraturan perundangan; (5) Meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat; (6) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat; dan (7) Mengajukan rancangan Peraturan Daerah dan menetapkannya sebagai Peraturan Daerah bersama DPRD. Wakil Bupati Bogor mempunyai tugas: (1) Membantu Bupati Bogor dalam melaksanakan kewajibannya; (2) Mengkoordinasikan kegiatan organisasi perangkat daerah/instansi pemerintah di daerah; (3) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati Bogor.

## **2. Sekretariat Daerah**

Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor mempunyai tugas pokok membantu Bupati Bogor dalam mengkoordinasikan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor mempunyai fungsi sebagai berikut: (1) Pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Daerah; (2) Pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Daerah; (3) Pengkoordinasian pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana, dan sarana Pemerintah Daerah; (4) Pengkoordinasian staf terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh perangkat daerah dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintahan; (5) Pengkoordinasian tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dalam arti mengumpulkan dan menganalisis data, merumuskan program dan petunjuk teknis serta monitoring dan evaluasi perkembangan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; (6) Pengkoordinasian perumusan peraturan perundangan yang menyangkut tugas pemerintahan daerah; (7) Pengkajian kebijakan pendayagunaan aparatur, organisasi dan tata laksana serta pelayanan teknis administratif perangkat daerah; (8) Pelaksanaan hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga; (9) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati Bogor sesuai dengan tugas dan fungsinya.



### **3. Sekretariat DPRD**

Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan administratif kepada anggota DPRD. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Sekretariat DPRD mempunyai fungsi: (1) Penyelenggaraan fasilitasi rapat DPRD; (2) Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas anggota DPRD; (3) Penyelenggaraan tata usaha DPRD; (4) Pengkajian produk peraturan perundangan; (5) Penyelenggaraan hubungan antara lembaga dan kemasyarakatan.

### **4. Dinas Daerah**

Dinas Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati Bogor dalam melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Dinas Daerah mempunyai fungsi: (1) Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis operasional sesuai dengan bidang tugasnya; (2) Pemberian izin dan pelaksanaan pelayanan umum; (3) Pembinaan terhadap unit pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas.

Dinas Daerah tahun 2013 terdiri dari:

- 1) Dinas Kesehatan;
- 2) Dinas Pendidikan;
- 3) Dinas Bina Marga dan Pengairan;
- 4) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
- 5) Dinas Kebersihan dan Pertamanan;
- 6) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- 7) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 8) Dinas Komunikasi dan Informasi;
- 9) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- 10) Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- 11) Dinas Pemuda dan Olahraga;
- 12) Dinas Pendapatan Daerah;
- 13) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah;
- 14) Dinas Pertanian dan Kehutanan;
- 15) Dinas Peternakan dan Perikanan;
- 16) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;



17) Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman;

18) Dinas Tata Ruang dan Pertanahan;

## **5. Lembaga Teknis Daerah**

Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati Bogor dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan daerah di bidangnya. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Lemtekda mempunyai fungsi: (1) Perumusan kebijakan teknis sesuai bidang tugasnya; (2) Pelaksanaan koordinasi dan pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Lembaga Teknis Daerah tahun 2013 terdiri dari:

- 1) Inspektorat;
- 2) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI;
- 3) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 4) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
- 5) Badan Lingkungan Hidup;
- 6) Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan;
- 7) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- 8) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- 9) Badan Perizinan Terpadu;
- 10) Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 11) RSUD Ciawi;
- 12) RSUD Cibinong;
- 13) RSUD Leuwiliang;
- 14) RSUD Cileungsi
- 15) Satuan Polisi Pamong Praja;
- 16) Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah;
- 17) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 18) Kantor Layanan Pengadaan Barang dan Jasa.

## **6. Kecamatan**

Kecamatan mempunyai tugas pokok membantu Bupati Bogor dalam menyelenggarakan sebagian kewenangan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan berdasarkan pelimpahan dari Bupati Bogor. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, kecamatan mempunyai fungsi: (1)



Penyelenggaraan tugas-tugas pokok kecamatan dan pembinaan kelurahan/desa; (2) Penyelenggaraan tugas-tugas ketentraman dan ketertiban wilayah; (3) Pengkoordinasian tugas-tugas pembangunan dan kemasyarakatan yang menjadi tanggungjawab kecamatan; (4) Penyelenggaraan pelayanan umum; (5) Pengkoordinasian perangkat daerah dalam wilayah kecamatan; (6) Pelaksanaan upaya-upaya pemberdayaan, menumbuhkan prakarsa, kreativitas dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Kecamatan tahun 2013 terdiri dari: Kecamatan Babakan Madang, Cariu, Cibinong, Cileungsi, Citeureup, Gunung Putri, Jonggol, Klapanunggal, Sukamakmur, Tanjungsari, Bojonggede, Ciomas, Ciseeng, Dramaga, Gunung Sindur, Kemang, Parung, Rancabungur, Sukaraja, Tajurhalang, Caringin, Ciampea, Ciawi, Cigombong, Cijeruk, Cisarua, Megamendung, Pamijahan, Tamansari, Tenjolaya, Cibungbulang, Cigudeg, Jasinga, Leuwiliang, Leuwisadeng, Nanggung, Parung Panjang, Rumpin, Sukajaya, dan Kecamatan Tenjo.

## 7. Kelurahan

Kelurahan mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam menyelenggarakan sebagian kewenangan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan berdasarkan pelimpahan dari Camat. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kelurahan mempunyai fungsi: (1) Penyelenggaraan tugas-tugas kelurahan; (2) penyelenggaraan tugas-tugas ketentraman dan ketertiban wilayah; (3) Pengkoordinasian tugas-tugas pembangunan dan kemasyarakatan yang menjadi tanggungjawab kelurahan; (4) Penyelenggaraan pelayanan umum; (5) Pelaksanaan upaya-upaya pemberdayaan, menumbuhkan prakarsa, kreativitas dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan kemasyarakatan. Jumlah kelurahan yang ada di Kabupaten Bogor sebanyak 17 kelurahan, terdiri dari:

**Tabel 1.1. Kelurahan di Kabupaten Bogor**

Kecamatan		Kelurahan	
1	Cibinong	1	Pabuaran
		2	Cibinong
		3	Cirimekar
		4	Ciriung
		5	Nanggewer

Kecamatan		Kelurahan	
		6	Nanggewer Mekar
		7	Sukahati
		8	Tengah
		9	Pakansari
		10	Karadenan
		11	Harapanjaya
		12	Pondok Rajeg
2	Kemang	13	Atang Senjaya
3	Ciomas	14	Padasuka
4	Cisarua	15	Cisarua
5	Citeureup	16	Karang Asem Barat
		17	Puspanegara

### 1.3 Kondisi Ekonomi

Kondisi Ekonomi Kabupaten Bogor pada tahun 2013 relatif stabil bahkan mengalami peningkatan yang sangat signifikan seiring dengan tumbuhnya beberapa sektor penggerak ekonomi dan membaiknya infrastruktur penunjang ekonomi. Hal ini dapat terlihat dari peningkatan pengembangan potensi unggulan daerah maupun pergerakan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Untuk lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut :

#### a. Potensi Unggulan Daerah

Produk Unggulan Daerah (PUD) merupakan suatu barang atau jasa yang dimiliki dan dikuasai oleh suatu daerah, yang mempunyai nilai ekonomis dan daya saing tinggi serta menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, yang diproduksi berdasarkan pertimbangan kelayakan teknis (bahan baku dan pasar), talenta masyarakat dan kelembagaan (penguasaan teknologi, kemampuan sumber daya manusia, dukungan infrastruktur, dan kondisi sosial budaya setempat) yang berkembang di lokasi tertentu. Kabupaten Bogor memiliki banyak sekali sumber daya alam yang sangat potensial untuk dikembangkan menjadi produk unggulan daerah. Untuk itu potensi-potensi sumber daya alam tersebut harus selalu dikembangkan agar menjadi komoditi unggulan yang memiliki daya saing yang kuat, baik di tingkat kabupaten, regional maupun tingkat nasional bahkan internasional. Kebijakan pengembangan komoditas unggulan baik yang telah berkembang maupun yang masih potensial di Kabupaten Bogor didasarkan pada Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2009 tentang Revitalisasi Pertanian dan



Pembangunan Perdesaan dan Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2010 tentang Peningkatan Daya Saing Produk Kabupaten Bogor serta hasil-hasil kajian pengembangan komoditas unggulan kecamatan oleh Bappeda Kabupaten Bogor, yang diantaranya memuat zonasi dan arah pengembangan sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

**Tabel 1.2. Zona Potensi Unggulan Daerah**

<b>Zona</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Arah Pengembangan</b>
1	Rumpin, Cigudeg, Parung Panjang, Jasinga, Tenjo	<b>Agrosilvopastoral</b> , yaitu pengembangan <i>agroforestry</i> yang didukung oleh sektor pertanian tanaman pangan dan peternakan
2	Sukajaya, Nanggung, Leuwiliang, Leuwisadeng, Cibungbulang, Pamijahan	<b>Agroekowisata</b> yang didukung oleh sektor pertanian tanaman pangan dan perikanan. Pola pengembangan komoditas strategis: agropolitan dan minapolitan
3	Ciampea, Tenjojaya, Dramaga, Ciomas	<b>Industri non-farm</b> yang didukung dengan sektor pertanian, perikanan, kehutanan, dan peternakan
4	Tajurhalang, Kemang, Rancabungur, Parung, Ciseeng, Gunung Sindur	<b>Industri perdesaan dan pengembangan UMKM</b> , yang tetap berbasiskan pada produk atau komoditas pertanian secara luas serta perikanan berbasis minapolitan
5	Tamansari, Cijeruk, Cigombong, Caringin	<b>Diversifikasi pertanian dan agroekowisata</b>
6	Ciawi, Cisarua, Megamendung, Sukaraja, Babakan Madang	<b>Ekowisata</b> yang dikerjasamakan dengan berbagai pihak dalam rangka membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat
7	Cileungsi, Klapanunggal, Gunung Putri, Citeureup, Cibinong, Bojonggede	<b>Pertanian perkotaan dan industri</b> . Pengembangan <i>urban agriculture</i> bertitik tolak pada produk atau komoditas pertanian yang sudah diusahakan oleh warga. Pengembangan industri besar dikaitkan dengan ada rencana pengembangan Cibinong Raya
8	Sukamakmur, Cariu, Tanjungsari, Jonggol	<b>Lumbung pangan</b> melalui peningkatan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pemukiman

Sumber: Bappeda Kab. Bogor

## 1) Pertanian

Beberapa potensi yang dimiliki wilayah Kabupaten Bogor yang telah berkembang maupun potensial untuk dikembangkan pada lapangan usaha pertanian terutama komoditi unggulan tanaman pangan dan hortikultura, antara lain : Talas Bogor, Nanas Gati, Pisang Rajabulu dan Manggis Raya. Keempat komoditi tersebut varietasnya telah dilepas/dirilis oleh Pusat Kajian Buah Tropika Institut Pertanian Bogor (PKBT-IPB) dan ditetapkan sebagai komoditi unggulan khas Kabupaten Bogor. Talas dan Nanas Bogor banyak dikembangkan di bagian selatan, terutama di Kecamatan Cigombong, Caringin, Cijeruk dan Tamansari. Pengembangan Talas dan Nanas sangat bergantung pada lokasi (spesifik lokasi). Produksi Talas tahun 2013 mencapai 11.223 ton, dengan lokasi pengembangan banyak terdapat di Kecamatan Dramaga, Tamansari, Cijeruk, Ciomas, Ciawi. Lokasi sentra pengembangan Nanas Bogor di Kecamatan Cijeruk. Produk utamanya adalah buah segar, dengan pemasaran yang sudah terjamin, sebagian besar merupakan bahan baku asinan bogor Gedong Dalam. Produksi Nanas tahun 2013 mencapai 5.517 ton. Tanaman Pisang Rajabulu banyak dikembangkan di Kecamatan Cisarua, Caringin, Ciawi dan Megamendung, dengan produksi mencapai 22.848 ton. Sedangkan manggis pemasarannya sampai ke mancanegara seperti Hongkong dan Taiwan, juga ke negara-negara di Timur Tengah. Pengembangan Manggis telah menggunakan Standar Operasional Prosedur (SOP) *Good Agricultural Practices* dalam budidayanya. Lokasi pengembangan di Kecamatan Leuwiliang, Leuwisadeng dan Klapanunggal, dengan produksi mencapai 4.859 ton pada tahun 2013.

Berdasarkan kelimpahan sumber daya atau produksi yang dihasilkan, komoditi unggulan tanaman pangan dan hortikultura lainnya adalah : anggrek potong dan tanaman hias berdaun indah. Komoditi yang potensial untuk dikembangkan sebagai komoditi unggulan adalah : padi sawah dan padi gogo, jagung, kacang tanah, ubi kayu, ubi jalar, pepaya, jambu biji, tanaman obat, melati, sedap malam, krisan, gladiol serta mawar.



## 2) Peternakan

Komoditi unggulan usaha peternakan pada tahun 2013 antara lain : sapi perah dengan sentra pengembangan di Kecamatan Cisarua, Pamijahan, Cibungbulang, Ciawi, Megamendung, Cijeruk dan Caringan; dan kambing Peranakan Etawa (PE) di Kecamatan Caringin, Tamansari, Cigombong, Cijeruk, Babakan madang, Sukamakmur, Ciampea. Sapi perah dan kambing PE cukup pesat perkembangannya dan mampu memberikan nilai tambah bagi usaha masyarakat juga meningkatkan produksi susu Kabupaten Bogor sebesar 12.051.421 liter/tahun. Populasi sapi perah pada tahun 2013 sebanyak 6.963 ekor, sedangkan populasi kambing PE tahun 2013 sebanyak 6.327 ekor. Pengembangan sapi perah saat ini sudah mampu melakukan diversifikasi produk yaitu selain susu juga yoghurt dan bahan makanan lainnya. Komoditi peternakan lainnya yang dapat dikembangkan sebagai komoditi unggulan tahun 2013 adalah sapi potong dengan populasi sebanyak 25.049 ekor dan domba sebanyak 203.373 ekor yang pengembangannya tersebar diwilayah kabupaten Bogor juga mampu meningkatkan produksi konsumsi protein hewani asal ternak sebesar 5,36 gr/kap/hari; ayam ras petelur sebanyak 4.244.880 ekor, ayam ras pedaging sebanyak 7.091.320 ekor dan ayam pembibit 1.001.906 ekor yang mampu meningkatkan produksi telur di Kabupaten Bogor sebesar 47.705.679 kg/tahun.

## 3) Perkebunan

Komoditi unggulan perkebunan yang dikelola masyarakat adalah : kopi, karet, dan pala. Produksi kopi pada tahun 2013 sebanyak 9.694 ton meningkat 0,78 persen dari tahun 2012, produksi karet rakyat sebesar 3.884 ton meningkat 13,28 persen dan produksi pala sebesar 1.353 ton meningkat sebesar 8,67 persen dari tahun 2012. Sentra pengembangan kopi di Kecamatan Sukamakmur, selain itu Kecamatan Pamijahan dan Tanjungsari juga menjadi penyumbang terbesar produksi kopi. Sentra pengembangan karet adalah Kecamatan Jasinga dengan Cigudeg sebagai wilayah pengembangannya. Sentra pengembangan pala adalah Kecamatan Cijeruk, daging pala banyak digunakan sebagai bahan manisan pala baik



kering maupun basah. Selain itu biji pala juga mempunyai potensi ekonomis sebagai rempah-rempah untuk obat dan bumbu dapur. Potensi komoditi perkebunan lainnya dapat dikembangkan sebagai komoditi unggulan adalah cengkeh, kelapa, teh dan tanaman obat.

4) Kehutanan

Belum ada komoditi kehutanan baik hasil hutan kayu maupun non kayu yang ditetapkan sebagai komoditi unggulan. Namun berdasarkan jumlah produksi di masyarakat terdapat potensi kayu rakyat yang dapat dikembangkan menjadi komoditi unggulan, yaitu kayu afrika dengan produksi 10.707,46 m<sup>3</sup>, kayu sengon (albizia) 7.274,29 m<sup>3</sup> dan kayu mahoni 4.295,59 m<sup>3</sup>.

5) Perikanan

Budidaya perikanan air tawar baik untuk produksi ikan konsumsi, pembibitan maupun ikan hias mampu menjadi tumpuan pemenuhan kebutuhan akan ikan konsumsi, bibit ikan dan ikan hias di Kabupaten Bogor. Pada tahun 2013 produksi ikan konsumsi sebanyak 88.810,51 ton dan Benih ikan konsumsi sebanyak 2.750.463,60 RE, dengan komoditi unggulan ikan lele dan ikan gurame yang pengembangannya tersebar di wilayah Kabupaten Bogor.

Komoditi unggulan lainnya adalah ikan hias air tawar, dengan lokasi pengembangannya adalah kecamatan Cibinong, Pamijahan, Cibungbulang, Ciampea, Tenjolaya, Ciomas Tajurhalang, Kemang, Tajur dan Ciseeng. Produksinya pada tahun 2013 sebesar 224.056 RE.

Kondisi Potensi Kabupaten Bogor sebagaimana diuraikan di atas secara ringkas disajikan pada Tabel 1.6. berikut ini.:

Tabel 1.3. Komoditi Potensi Unggulan dan Komoditi Unggulan Kelompok Lapangan Usaha Pertanian Kabupaten Bogor Tahun 2013

NO	KEGIATAN/ USAHA/SEKTOR	DATA		
		JENIS POTENSI UNGGULAN	PRODUKSI / POPULASI KESELURUHAN	LOKASI DESA/KECAMATAN
1	Usaha Tanaman Pangan	Padi sawah (ton)	590,131	Cigudeg, Sukajaya, Cibungbulang, Pamijahan, Jonggol, Sukamakmur, Cariu, Tanjungsari
		Padi Gogo (ton)	6,596	Tenjo, Parungpanjang, Jasinga
		Jagung (ton)	944	Cibungbulang, Pamijahan, Ciampea, Tenjolaya, Dramaga, Tamansari



NO	KEGIATAN/ USAHA/SEKTOR	DATA		
		JENIS POTENSI UNGGULAN	PRODUKSI / POPULASI KESELURUHAN	LOKASI DESA/KECAMATAN
		Kacang Tanah (ton)	1,607	Cibungbulang, Kemang, Megamendung
		Ubi Kayu (ton)	130,225	Sukaraja, Citeureup, Babakan madang, Cibinong, Sukamakmur, Cibungbulang
		Ubi Jalar (ton)	48,371	Cibungbulang, Dramaga, Tenjolaya, Pamijahan
		Wortel (ton)	2,815	Ciawi, Megamendung, Cisarua
		Bawang daun (ton)	3,225	Ciawi, Megamendung, Cisarua
		Mentimun (ton)	8,324	Kemang, Rancabungur, Ciawi
		Kacang panjang (ton)	8,635	Kemang, Tamansari, Rancabungur, Dramaga
		Cabe merah (ton)	3,832	Ciawi, Megamendung, Cijeruk, caringin
		Durian (ton)	12,451	Cariu, Ciseeng, caringin, Cijeruk
		Rambutan (ton)	22,709	Cileungsi, Parung, Ciseeng
		Manggis (ton)	4,859	Leuwiliang, Jasinga, Cigudeg
		Nenas (ton)	5,517	Cijeruk, Tamansari
2	<b>Budidaya Tanaman Hias</b>	Melati (kg)	3,414	Nanggung, Cibungbulang
		Sedap malam (tangcai)	91,205	Tamansari Cigombong
		Krisan (tangcai)	171,217	Tenjolaya, Tamansari, Cisarua
		Gladiol (tangcai)	5,665	Megamendung
		Mawar (tangcai)	3,125	Megamendung
		Anggrek potong (tangcai)	3,489,736	Gunungsindur, Tajurhalang
		Tanaman hias berdaun indah (pohon)	372,744	Tersebar di 12 kec
3	<b>Perkebunan Rakyat</b>	Cengkeh (ton bahan mentah)	832	Pamijahan, Sukamakmur
		Pala (ton bahan mentah)	1,353	Desa Cibalung Kec. Cijeruk
		Karet (ton bahan mentah)	3,885	Jasinga, Cigudeg
		Kelapa (ton bahan mentah)	4,052	Leuwiliang, Ciampea, Rumpin
		Kelapa Hibrida (ton bahan mentah)	8,857	Gunungsindur, Rumpin, Cibinong
		Aren (ton bahan mentah)	16	Jasinga, Cigudeg, Cigombong
		Kopi (ton bahan mentah)	9,657	Pamijahan, Sukamakmur, Tanjungsari
		Teh (ton bahan mentah)	20	Sukajaya, Cijeruk, Cisarua
		Vanili	18	-
		Kapulaga		-
		Lada (ton bahan mentah)	4	Sukamakmur, Sukajaya, Caringin
4	<b>Hutan Rakyat</b>	Albizia (M3)	5,555	Cariu, Cisarua, Leuwiliang, Megamendung, Tamansari



NO	KEGIATAN/ USAHA/SEKTOR	DATA		
		JENIS POTENSI UNGGULAN	PRODUKSI / POPULASI KESELURUHAN	LOKASI DESA/KECAMATAN
		Mahoni (M3)	2,422	Klapanunggal, Sukaraja, Cisarua, Tamansari, Cibungbulang, Leuwiliang
		Afrika (M3)	2,636	Rumpin, leuwiliang, Jasinga, Sukamakmur, Cigudeg
		Jati (M3)	-	Jasinga, Cigudeg, Ciawi, Caringin, Jonggol
		Campuran (M3)	3,242	Megamendung, caringin, Parungpanjang, Cibungbulang, Tamansari
<b>5</b>	<b>Usaha Perikanan</b>			
	a Budidaya Ikan Konsumsi dan Penangkapan di Perairan Umum	Ikan konsumsi (ton)	8,881,051	Tersebar
	b Budidaya ikan hias	Ikan hias air tawar (RE)	224,056	Pamijahan, Cibungbulang, Ciampea, Tenjolaya, Ciomas, Cibinong, Tajurhalang, Kemang, Tajur, Ciseeng
	c Pembenuhan	Benih Ikan Konsumsi (RE)	2,750,463.60	Tersebar
<b>6</b>	<b>Usaha Peternakan</b>			
	a Unggas	Ayam ras petelur (ekor)	4,244,880	Gunungsindur, Rumpin, Cigudeg, Parungpanjang, Tenjo, Jasinga, Babakanmadang, Parung, Megamendung, Cibinong, Leuwiliang, Nanggung
		Ayam ras pedaging (ekor)	7,091,320	Pamijahan, Nanggung, Gunungsindur, Parungpanjang, Cibungbulang, Leuwiliang, Parung, Caringin, Cigombong, Tajurhalang, Cariu, Cigudeg, Kemang, Rumpin, Cijeruk, Cibinong, Jasinga
		Ayam ras pembibit (ekor)	1,001,906	Rumpin, Tamansari, Parungpanjang, Gunungsindur, Megamendung, Cigudeg, Jasinga, Leuwisadeng
	b Ternak Besar	Sapi potong (ekor)	25,049	Tersebar
		Sapi perah (ekor)	6,963	Pamijahan, Cibungbulang, Cisarua, Ciawi, Megamendung, Cijeruk, Caringin
	c Ternak Kecil	Domba (ekor)	203,373	Tersebar
		Kambing PE (ekor)	6,327	Tamansari, Caringin, Cigombong, Cijeruk, Babakanmadang, Sukamakmur, Ciampea

Sumber : 1: Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor 2013  
2: Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bogor 2013

## 6) Industri Menengah Besar dan Industri Kecil Menengah

Sektor industri terdiri Industri Menengah Besar dan Industri Kecil Menengah. Sektor industri menengah besar didominasi oleh industri agro dan industri logam dengan nilai investasi sebesar Rp.864.222.125.182,- dan Rp.572.941.718.219,-. Selain unggul dalam nilai investasi, kedua industri ini juga unggul dalam jumlah unit usaha yaitu sebesar 214 unit usaha untuk



industri agro dan 147 unit usaha untuk industri logam. Sementara industri menengah besar yang paling banyak menyerap tenaga kerja adalah industri tekstil dan produk tekstil dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 26.342 orang.

Sementara potensi industri kecil menengah meliputi IKM hasil hutan dengan nilai investasi sebesar Rp.93.966.054.252,- dari 202 unit usaha, IKM agro dengan nilai investasi sebesar Rp.27.823.100.666,- dari 392 unit usaha serta IKM tekstil dan produk tekstil dengan nilai investasi sebesar Rp.16.612.173.250,- dari 400 unit usaha. Sedangkan komoditi unggulan perdesaan industri kecil menengah (IKM) baik formal maupun non formal meliputi produk alas kaki, tas dan logam. Ketiga komoditi tersebut menjadi concern pemerintah daerah dalam pengembangannya yang meliputi beberapa kecamatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1.3 berikut ini:

Tabel 1.4. Komoditi Potensi Unggulan dan Komoditi Unggulan Kelompok Lapangan Usaha Industri Kabupaten Bogor Tahun 2013

NO	KEGIATAN/USAHA/ SEKTOR		DATA		
			JENIS POTENSI UNGGULAN	PRODUKSI / POPULASI KESELURUHAN	LOKASI DESA/KECAMATAN
1	Industri Industri Besar	1.	Komponen Kendaraan bermotor	407.209.465 pcs	Ciawi, Cibinong, Citeureup, Gn. Putri, Cileungsi, Sukaraja, Babakan Madang, Parung panjang
		2.	Peralatan Kantor dari Logam	463.325 buah	Gunung Putri, Cileungsi, Cibinong, Citeureup
		3.	Kemasan kaleng	35.500 pcs	Gunung Putri
		4.	Karoseri	165.899 buah	Cileungsi, Babakan Madang, Sukaraja, Gunung Putri, Cibinong, Klapanunggal
		5.	Mesin Industri	320.601 buah	Ciampea, Cibinong, Gunung Putri, Citeureup, Cijeruk, Cileungsi Klapanunggal, Ciomas
		6.	Karet	2.000.000 pcs	Gunung Putri, Tajurhalang, Cileungsi, Cibinong, Ciampea
				1.821 ton	
				18.000 lembar	
		7.	Bahan Kimia	32.460 ton	Babakan madang, Cibinong
8.	Air Kemasan	144.677.000 liter	Citeureup, Tamansari, Cijujung, Sukaraja, Klapanunggal, Ciampea, Cigombong, Ciseeng, Megamendung		
9.	Furniture	1.440 ton	Cileungsi, Gunungputi, Babakan madang, Citeureup, Jonggol		
		193.076 buah			

NO	KEGIATAN/USAHA/ SEKTOR	DATA		
		JENIS POTENSI UNGGULAN	PRODUKSI / POPULASI KESELURUHAN	LOKASI DESA/KECAMATAN
			40.000 set	
		10	Pengalengan Hasil Laut	Klapanunggal
2	Industri Kecil dan Menengah	1.	Konveksi/ Garment	Ciampea, Caringin, Ciawi, Ciseeng
		2.	Sepatu, sandal dan tas	Tamansari, Ciomas, Dramaga, Kemang, Cibungbulang
		3.	Miniatur pesawat	Cikarawang, Dramaga,
		4.	Meubel bambu	Cariu, Cibinong
		5.	Anyaman bambu	Rumpin, Tenjo, Tenjolaya, Cigudeg
		6.	Bunga kering	Leuwisadeng, Tenjolaya

Sumber: Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bogor, 2013

## 7) Penggalan dan Pertambangan

Pada komoditi lapangan usaha penggalan dan pertambangan, pada umumnya sudah banyak diusahakan dengan pangsa pasar tersendiri. Namun demikian terdapat komoditi yang menjadi unggulan, antara lain : emas, perak serta andesit, tanah liat dan batu kapur yang merupakan bahan galian konstruksi. Tabel 1.8. menyajikan komoditi potensi unggulan dan komoditi unggulan lapangan usaha penggalan dan pertambangan..

Tabel 1.5. Komoditi Potensi Unggulan dan Komoditi Unggulan Kelompok Lapangan Usaha Penggalan dan Pertambangan Kab. Bogor Tahun 2013

No.	Kegiatan/Usaha/ Sektor	Data		
		Komoditi Potensi Unggulan	Komoditi Unggulan	Produksi/Populasi Keseluruhan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pertambangan Bahan Galian Mineral Non Logam dan batuan (ton)	Pasir & kerikil Tanah Urug	Andesit	10.653.461,16
			Tanah Liat	147.205,53
			Batu Kapur	95.573,40
		Trass		2.993.341,80
				20.531.450,40
				105.297,50
2	Bahan Galian Mineral Logam (kg)		Emas	1.700,04
			Perak	14.994,79

Sumber : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bogor 2013

## 8) Pariwisata

Daya tarik wisata Kabupaten Bogor merupakan perpaduan antara karakter alamnya yang kuat, kebudayaan dan kepurbakalaan. Kawasan puncak merupakan kawasan primadona yang sampai saat ini belum tergantikan. Pada zona Bogor Barat terdapat kawasan Gunung Salak Endah yang merupakan kawasan wisata andalan untuk alternatif pengganti puncak.



Selain itu, atraksi seni dan budaya digelar dalam *event* “Helaran” yang secara rutin digelar setiap setahun sekali dan merupakan ajang atraksi seni budaya dari perwakilan masing-masing kecamatan. Potensi wisata yang diunggulkan di Kabupaten Bogor dibedakan berdasarkan daya tarik wisata menurut Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Nasional meliputi:

a) Daya Tarik Wisata Alam

Kawasan Puncak terletak di Selatan Bogor yang merupakan daerah perbukitan dengan ketinggian antara 800-1500 m dpl, sehingga memiliki udara yang sejuk dan segar. Pada kawasan ini dapat dinikmati keindahan aneka obyek dan daya tarik wisata diantaranya: wisata Agro Gunung Mas, panorama alam Riung Gunung, Telaga Warna, Curug Cilember, dan Taman Safari Indonesia. Selain itu banyak aktifitas wisata yang dapat dilakukan dengan seting alam diantaranya : *tea walk*, menunggang kuda, paralayang, *outbond*, fotografi dan lain-lain, Kawasan wisata dengan panorama alam yang indah dan berhawa sejuk tersebut telah didukung fasilitas *camping ground*, taman rekreasi, hutan wisata, hotel melati, pondok wisata, tempat pertemuan dan seminar, sarana olah raga dan wartel.

b) Daya Tarik Wisata Buatan

Daya tarik wisata buatan dikembangkan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat di suatu wilayah yang tidak memiliki potensi asli, salah satu wisata buatan yang menjadi tujuan wisata terbesar di Kabupaten Bogor adalah Taman Safari Indonesia (TSI) di Kecamatan Cisarua Bogor. TSI merupakan taman satwa terbesar di Indonesia dengan jumlah spesies satwa dan lokal tidak kurang dari 1,500 spesies. Jumlah kunjungan tahun 2013 tercatat 597,132 orang.

Selain Taman Safari Indonesia masih banyak daya tarik wisata buatan lainnya yang tersebar di Kabupaten Bogor yaitu : Taman Wisata Matahari, Sirkuit Sentul, Taman Rekreasi Lido, Jungle Land Sentul, Wisata Desa Kampung Bambu, Kampung Wisata Cinangneng, serta Museum Mobil dan Keramik Sentul.



c) Wisata Budaya

Kabupaten Bogor memiliki berbagai atraksi seni dan budaya tradisional yang digelar dalam *event* Helaran secara rutin setiap tahun, Acara ini merupakan ajang atraksi seni dan budaya yang merupakan perwakilan dari masing-masing kecamatan, Objek wisata yang menjadi unggulan pada wisata budaya adalah Kampung Budaya Sindang Barang, dengan jumlah kunjungan sebesar 12,637 orang atau meningkat sebesar 3.5% dari tahun sebelumnya. Selain Kampung Budaya Sindang Barang, terdapat potensi wisata budaya unggulan lainnya seperti : Situs Batu Tulis Ciaruteun, Kampung Adat Urug di Kecamatan Sukajaya, Bellacampa, Kampung Cina, Pura Parahyangan Agung Jagatkarta dan 19 Benda Cagar Budaya.

Tabel 1.6. Komoditi Potensi Unggulan dan Komoditi Unggulan Kelompok Lapangan Usaha Pariwisata Kabupaten Bogor Tahun 2013

NO	KEGIATAN/ USAHA/SEKTOR	DATA		
		JENIS POTENSI UNGGULAN	PRODUKSI / POPULASI KESELURUHAN	LOKASI DESA/KECAMATAN
1	Pariwisata	<u>Wisata alam</u>		
		Wisata Agro Gunung Mas		Jl. Raya Puncak Km.87
		Telaga Warna		Ds Tugu Utara kec. Cisarua
		Wana Wisata Badogol		Jl. Raya Bogor-Sukabumi Km. 18
				Cisempur-Cinaga Bogor
		Curug Luhur		Ds Gunung Malang Tapos RT 02/05 Tenjolaya
		Air Panas Gunung Pancar		Ds. Karang Tengah Kec. Babakan Madang
		Giri Tirta Kawah Hitam		Ds. Karang Tengah Kec. Babakan Madang
		Panorama Alam Riung Gunung		Kec. Cisarua
		Air Panas Gunung Salak Endah		Kp. Lokapurna Ds. Gunungsari
				Kec. Pamijahan
		Curug Cigamea		Kp. Lokapurna Ds. Gunungsari
				Kec. Pamijahan
		Curug Seribu		Kp. Lokapurna Ds. Gunungsari
				Kec. Pamijahan
		Curug Ngumpet		Kp. Lokapurna Ds. Gunungsari
				Kec. Pamijahan
		Goa Gundawang		Ds. Argapura Kec. Cigudeg
		Eko Wisata Gunung Bunder		Ds. Gunung Bunder Kec. Pamijahan
		Curug Nangka		Ds. Warung Loa Kec. Taman Sari
		Curug Cilember		Jl. Raya Puncak Ds. Joajoan Kec. Cisarua
		Eko Wisata Sukamantri		Kec. Taman Sari

NO	KEGIATAN/ USAHA/SEKTOR	DATA		
		JENIS POTENSI UNGGULAN	PRODUKSI / POPULASI KESELURUHAN	LOKASI DESA/KECAMATAN
		Wana Wisata Penangkaran Rusa		Ds. Giri Jaya Kec. Tanjung Sari
		Eko Wisata Kawah Ratu		Ds. Gunung Bunder Kec. Pamijahan
		Curug Panjang		Ds. Megamendung Kec. Megamendung
		Telaga Malimping		Kp. Malimpingg Kec. Caringin
		Batu Tulis Ciareuteun		Kec. Cibungbulang
		Curug Cilember		Jl. Raya Puncak Desa Jogjogan Cisarua
		<b>Wisata buatan</b>		Jl. Raya Puncak No. 601 Cisarua Bogor
		Taman Safari Indonesia		Jl. Raya Cileungsi-Jonggol Km.3 Bogor
		Taman Wisata Mekarsari		Ds. Wates Jaya Kec. Cijeruk
		Taman Wisata Lido		Kec. Babakan Madang
		Sirkuit Sentul		Jl. Raya Sentul Km. 42 Ds. Sentul
		Museum Mobil dan Keramik		Kec. Babakan Madang
				Jl. Raya Tajur Pasir Mukti Km.4 Citereup
		Kebun Wisata Pasir Mukti		Jl. Raya Puncak Km. 87 Cisarua
		Taman Bunga Mel Rimba		Jl. Raya Gunung Kapur Ciseeng-Parung
		Taman Wisata Tirta Sanita		Kp. Cibaliung Kec. Cijeruk
		Cibalung Happyland		Kec. Ciampea
		Museum Pasir Angin		Jl. Raya Puncak Km. 77- Cilember
		Taman Wisata Matahari		Desa Tugu Selatan - Cisarua
		Bumi Perkemahan Citamiang		Desa Bojong Koneng - Babakan Madang
		Curug Luhur Paradise Park		Kp. Babakan Kemang RT 01/02
		Kampung Wisata Cinangneng		Desa Cihideung Udik - Ciampea
				Babakan Madang
		Jungle Land		Cileungsi
		Water Park Kingdom		

Sumber: Bappeda Kab. Bogor

#### 1.4 Gambaran Umum Demografis

Secara umum, kondisi demografis Kabupaten Bogor dapat digambarkan bahwa penduduk Kabupaten Bogor berdasarkan estimasi Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2013 berjumlah 5.111.769 jiwa (angka sementara), yang terdiri dari penduduk laki-laki 2.616.962 jiwa dan penduduk perempuan 2.494.807 jiwa. Jumlah penduduk tersebut hasil proyeksi penduduk dengan asumsi laju pertumbuhan penduduk sebesar 2,44 persen dibanding tahun 2012.

Jika diperbandingkan antar wilayah kecamatan yang tercakup dalam wilayah Kabupaten Bogor, hasil proyeksi penduduk tahun 2013 menunjukkan terdapat 11



kecamatan yang memiliki laju pertumbuhan penduduk (LPP) lebih tinggi dari pada LPP Kabupaten Bogor (2,44 persen). LPP terbesar terdapat di Kecamatan Gunung Putri, Bojong Gede dan Cileungsi, masing-masing sebesar 5,39 persen, 4,96 persen dan 4,83 persen. Sementara di Kecamatan Cibinong, sebagai ibu kota Kabupaten Bogor, LPP mencapai 3,73 persen.

Pertambahan penduduk di Kecamatan Gunung Putri, Cileungsi dan Cibinong dapat dikatakan sangat pesat karena ketiga kecamatan tersebut merupakan pusat pengembangan usaha industri dan pemukiman. Berbagai jenis usaha industri besar maupun industri sedang berkembang cukup beragam, yang menyebabkan banyak masuknya penduduk dari luar kecamatan sebagai tenaga kerja untuk bermukim di kecamatan setempat.

Adapun perkembangan penduduk di Kecamatan Bojong Gede lebih disebabkan pesatnya pertumbuhan pemukiman di wilayah ini. Umumnya penduduk yang tinggal di Kecamatan Bojonggede bekerja di Jakarta yang merupakan pekerja ulang alik (commuter), karena aksesibilitas transportasi menuju dan keluar dari kecamatan ini menuju Jakarta sebagai ibukota negara, lebih mudah dijangkau baik dari segi biaya maupun fasilitas transportasi umum yang murah dan cepat. Di Kecamatan Bojong Gede terdapat 2 (dua) Stasiun Kereta Api Bogor-Jakarta, yaitu Stasiun Bojong Gede dan Stasiun Cilebut, selain itu terhubung dengan jalur jalan raya dari pusat ibukota kabupaten (Cibinong).

Data sex ratio penduduk Kabupaten Bogor pada tahun 2013 adalah sebesar 105, artinya setiap 100 orang perempuan terdapat 105 orang laki-laki. Hampir di semua kecamatan di Kabupaten Bogor memiliki sex ratio diatas 100, yang berarti berlaku umum bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari pada jumlah penduduk perempuan di daerah tersebut. Namun terdapat satu kecamatan yang nilai sex rasionya di bawah 100, yaitu Kecamatan Gunung Putri sebesar 98, yang artinya setiap 100 orang perempuan terdapat 98 orang laki-laki. Hal ini disebabkan sebagai daerah pengembangan usaha industri besar dan sedang, tampaknya menarik minat banyak pekerja wanita untuk bekerja dan bermukim di wilayah Kecamatan Gunung Putri. Kondisi demografis Kabupaten Bogor sebagaimana diuraikan di atas secara ringkas disajikan pada tabel 1.7 berikut ini:



Tabel 1.7. Proyeksi Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2012-2013\*)

No	Kecamatan	2012 (Juni)			2013*) (Juni)		
		Laki-laki	Perempuan	L+P	Laki-laki	Perempuan	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Nanggung	43.798	40.582	84.380	43.834	40.916	84.750
2	Leuwiliang	59.663	55.427	115.090	60.043	56.193	116.236
3	Leuwisadeng	37.364	34.110	71.474	37.475	34.465	71.940
4	Pamijahan	69.720	65.554	135.274	69.982	66.288	136.270
5	Cibungbulang	65.528	61.276	126.804	65.853	62.036	127.889
6	Ciampea	77.355	72.554	149.909	77.955	73.658	151.613
7	Tenjolaya	28.582	27.122	55.704	28.750	27.482	56.232
8	Dramaga	52.161	50.767	102.928	52.650	51.623	104.273
9	Ciomas	80.331	76.388	156.719	82.155	78.700	160.855
10	Tamansari	49.224	45.722	94.946	49.915	46.707	96.622
11	Cijeruk	42.373	38.345	80.718	42.855	39.067	81.922
12	Cigombong	47.145	44.778	91.923	48.001	45.929	93.930
13	Caringin	60.091	56.595	116.686	60.632	57.527	118.159
14	Ciawi	55.139	51.159	106.298	55.912	52.259	108.171
15	Cisarua	59.895	55.356	115.251	60.478	56.308	116.786
16	Megamendung	52.014	47.241	99.255	52.554	48.085	100.639
17	Sukaraja	92.891	88.005	180.896	94.719	90.400	185.119
18	Babakan Madang	55.932	52.285	108.217	57.190	53.855	111.045
19	Sukamakmur	39.097	36.396	75.493	39.277	36.835	76.112
20	Cariu	23.087	22.719	45.806	22.967	22.767	45.734
21	Tanjungsari	25.586	24.622	50.208	25.602	24.820	50.422
22	Jonggol	65.198	62.577	127.775	66.397	64.199	130.596
23	Cileungsi	137.424	133.047	270.471	143.540	139.996	283.536
24	Kelapa Nunggal	52.237	49.090	101.327	53.805	50.937	104.742
25	Gunung Putri	170.806	173.140	343.946	179.340	183.135	362.475
26	Citeureup	105.589	100.539	206.128	107.414	103.033	210.447
27	Cibinong	178.726	171.969	350.695	184.729	179.059	363.788
28	Bojong Gede	133.332	126.984	260.316	139.446	133.789	273.235
29	Tajur Halang	53.105	50.407	103.512	54.650	52.257	106.907
30	Kemang	49.849	47.116	96.965	50.951	48.514	99.465
31	Ranca Bungur	26.397	24.509	50.906	26.578	24.861	51.439
32	Parung	62.025	57.878	119.903	63.863	60.034	123.897
33	Ciseeng	52.902	49.054	101.956	53.788	50.246	104.034
34	Gunung Sindur	56.541	53.396	109.937	58.266	55.432	113.698
35	Rumpin	68.586	62.894	131.480	69.090	63.825	132.915
36	Cigudeg	62.390	56.574	118.964	62.740	57.312	120.052
37	Sukajaya	29.197	26.725	55.922	29.223	26.947	56.170
38	Jasinga	48.437	45.041	93.478	48.476	45.410	93.886
39	Tenjo	34.785	32.438	67.223	35.028	32.908	67.936
40	Parung Panjang	59.617	55.439	115.056	60.839	56.993	117.832
<b>KABUPATEN BOGOR</b>		<b>2.564.119</b>	<b>2.425.820</b>	<b>4.989.939</b>	<b>2.616.962</b>	<b>2.494.807</b>	<b>5.111.769</b>

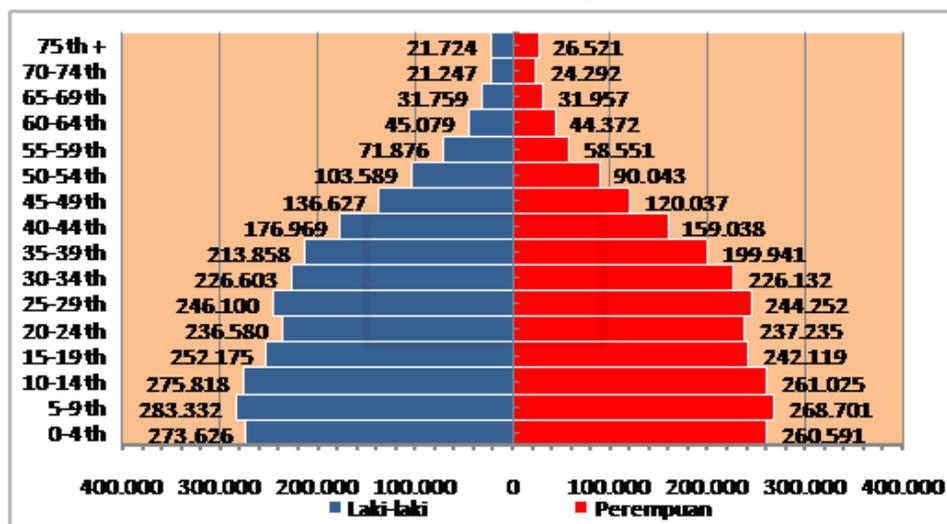
Sumber: BPS, Angka DAU

Keterangan : \*) BPS, Angka Proyeksi SP2010



Selanjutnya, dari piramida penduduk yang disusun berdasarkan kelompok umur 5 tahunan menunjukkan bahwa penduduk di Kabupaten Bogor termasuk penduduk muda. Struktur penduduk muda biasanya diperlihatkan oleh panjang piramida kelompok umur 5-9 dan 10-14 tahun lebih panjang dari pada kelompok umur lainnya. Hal ini terlihat jelas dari Gambar 1.1. dimana bentuk piramidanya cenderung mengerucut di bagian atas. Atau dapat diartikan juga, ada kecenderungan komposisi penduduk Kabupaten Bogor di masa depan akan semakin didominasi oleh penduduk usia produktif.

Gambar 1.2. Piramida Penduduk Kabupaten Bogor Tahun 2012 Berdasarkan Hasil Proyeksi



Sumber: Bappeda Kab. Bogor

Sementara itu, penggolongan usia produktif atau tidak produktif berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- Penduduk Usia Tidak Produktif jika persentase penduduk 0-14 tahun minimal sebanyak 40 persen dan penduduk 65 tahun ke atas tidak melebihi 5 persen dari total penduduk secara keseluruhan;
- Penduduk Usia Produktif jika persentase penduduk yang berusia 0-14 tahun maksimal 30 persen dan penduduk yang berusia 15-64 tahun persentasenya lebih dari 60 persen.

Tabel 1.8. Jumlah Penduduk Per Kelompok Umur Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Bogor Tahun 2013

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah L+P
0 – 4	272,125	258,220	530,345
5 – 9	282,054	266,602	548,656
10-14	275,456	260,092	535,548



Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah L+P
15-19	251,833	240,358	492,191
20-24	235,531	234,666	470,197
25-29	244,299	240,940	485,239
30-34	224,282	222,591	446,873
35-39	211,663	197,009	408,672
40-44	175,154	157,069	332,223
45-49	135,680	118,975	254,655
50-54	103,256	89,527	192,783
55-59	71,733	58,213	129,946
60-64	45,145	44,254	89,399
65-69	31,821	31,881	63,702
70-74	21,361	24,300	45,661
75+	21,858	26,520	48,378
TT	1,622	1,120	2,742
Jumlah	2,604,873	2,472,337	5,077,210

Sumber: BPS. Proyeksi Hasil SP 2010

Dari gambaran tabel di atas, dapat kita lihat bahwa komposisi penduduk Kabupaten Bogor merupakan penduduk usia produktif dimana penduduk usia (15-64) tahun sebanyak 65,17 persen, sedangkan penduduk usia non produktif (0-14) tahun sebanyak 31,75 persen, dan usia 65 tahun ke atas sebanyak 3,08 persen. Hal ini memberikan indikasi bahwa permasalahan ketenagakerjaan di Kabupaten Bogor merupakan pekerjaan rumah yang harus mendapat perhatian serius.

Penghitungan penduduk usia produktif dan tidak produktif erat kaitannya dengan rasio beban ketergantungan (Burden of Dependency Ratio). Rasio beban ketergantungan merupakan perbandingan antara jumlah penduduk yang berusia 0-14 tahun dan penduduk berusia 65 tahun ke atas terhadap jumlah penduduk yang berusia 15-64 tahun. Hasil proyeksi menunjukkan bahwa rasio ketergantungan anak di Kabupaten Bogor tahun 2013 sebesar 48,72 persen, dan rasio ketergantungan lanjut sebesar 4,73 persen atau secara keseluruhan angka beban ketergantungan Kabupaten Bogor sebesar 53,45 persen. Hal ini dapat diartikan bahwa untuk setiap 100 penduduk usia produktif harus menanggung sebanyak 53 penduduk yang tidak/belum produktif.

Proporsi penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha merupakan salah satu indikator untuk melihat potensi sektor perekonomian dalam menyerap tenaga kerja, dan sebagai salah satu ukuran untuk menunjukkan struktur perekonomian suatu wilayah. Tabel berikut menggambarkan jumlah prosentase penduduk Kabupaten Bogor yang bekerja (15 tahun ke atas) dirinci menurut lapangan usaha.



Tabel 1.9. Proporsi Penduduk Usia 15 Tahun Ke atas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011 - 2012

Lapangan Usaha	2011		2012	
	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pertanian	239.325	12,92	266.492	13,36
2. Pertambangan & Penggalian	52.143	2,82	82.045	4,11
3. Industri Pengolahan	526.357	28,42	575.770	28,86
4. Listrik, Gas dan Air Minum	2.545	0,14	2.293	0,11
5. Konstruksi	97.193	5,25	115.605	5,79
6. Perdagangan, Hotel & Restoran	493.234	26,63	511.351	25,63
7. Transportasi & Komunikasi	126.366	6,82	118.681	5,95
8. Lembaga Keuangan	54.768	2,96	48.775	2,44
9. Jasa Sosial Kemasyarakatan	260.234	14,05	274.020	13,74
<b>Jumlah</b>	<b>1.852.165</b>	<b>100,00</b>	<b>1.995.032</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional 2011 dan 2012

Secara total, jumlah penduduk bekerja di Kabupaten Bogor mengalami peningkatan dari 1.852.165 orang pada tahun 2011 menjadi 1.995.032 orang tahun 2012 (meningkat 7,71%). Tabel di atas memperlihatkan bahwa ada 4 (empat) sektor mengalami peningkatan dalam penyerapan tenaga kerja, 5 (lima) sektor mengalami penurunan, yaitu sektor : Listrik, Gas dan Air Minum; Perdagangan, Hotel dan Restoran; Transportasi dan Komunikasi; Lembaga Keuangan; dan Jasa Sosial Kemasyarakatan. Komposisi di atas menunjukkan adanya transisi pergeseran sektor penyerapan tenaga kerja Kabupaten Bogor dari sektor pertanian, ke sektor industri pengolahan, perdagangan, Hotel dan Komunikasi serta jasa sosial kemasyarakatan.

Tabel 1.10. Jumlah dan Persentase Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Bogor Tahun 2011-2012

No.	Tingkat Pendidikan	2011		2012	
		Jumlah	(%)	Jumlah	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	≤ SD	989.012	53,40	1.038.503	52,05
2	SLTP	361.470	19,52	400.964	20,10
3	SLTA	397.935	21,48	432.152	21,66
4	Perguruan Tinggi	103.748	5,60	123.413	6,19

Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional 2012

Struktur pendidikan penduduk bekerja di Kabupaten Bogor secara umum dapat dilihat pada Tabel 1.10. Masih tingginya persentase penduduk bekerja dengan tingkat pendidikan rendah (SD ke bawah) yang mencapai 53.40%, memperlihatkan kualitas penduduk bekerja di Kabupaten Bogor secara umum masih terbilang rendah. Hal ini perlu menjadi perhatian, karena ketidaksesuaian keahlian yang dimiliki oleh pencari kerja dengan kebutuhan pasar kerja dapat menimbulkan permasalahan mendasar yang tidak mungkin bisa dielakkan. Data sebelumnya menunjukkan terdapat

pergeseran lapangan usaha yang digeluti sehingga diperlukan peningkatan pendidikan tenaga kerja.

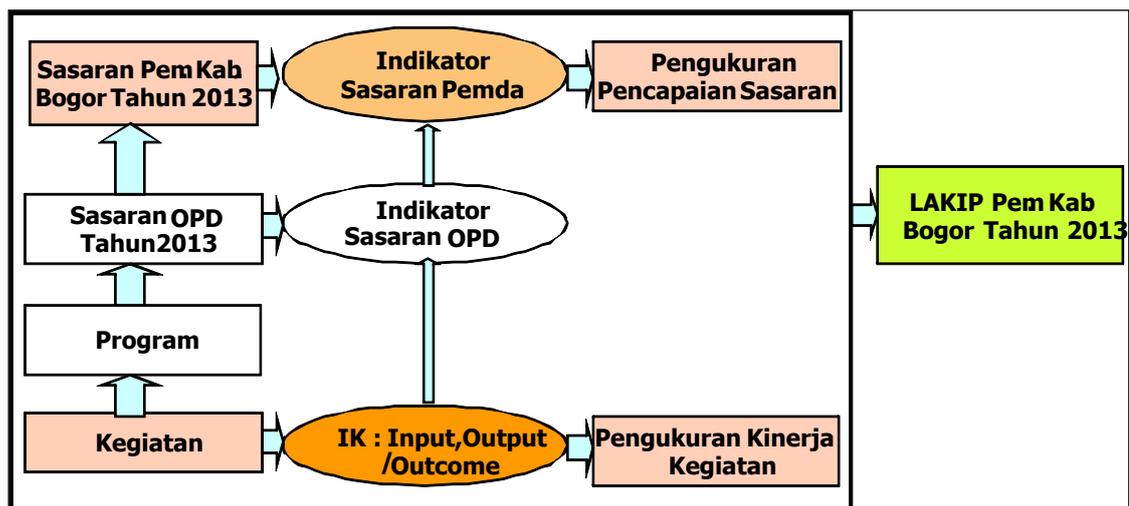
### 1.5 Sistematika Penyajian

LAKIP adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pencapaian sasaran strategis organisasi yang berkaitan dengan Visi dan Misi organisasi melalui berbagai program dan kegiatan tahunan.

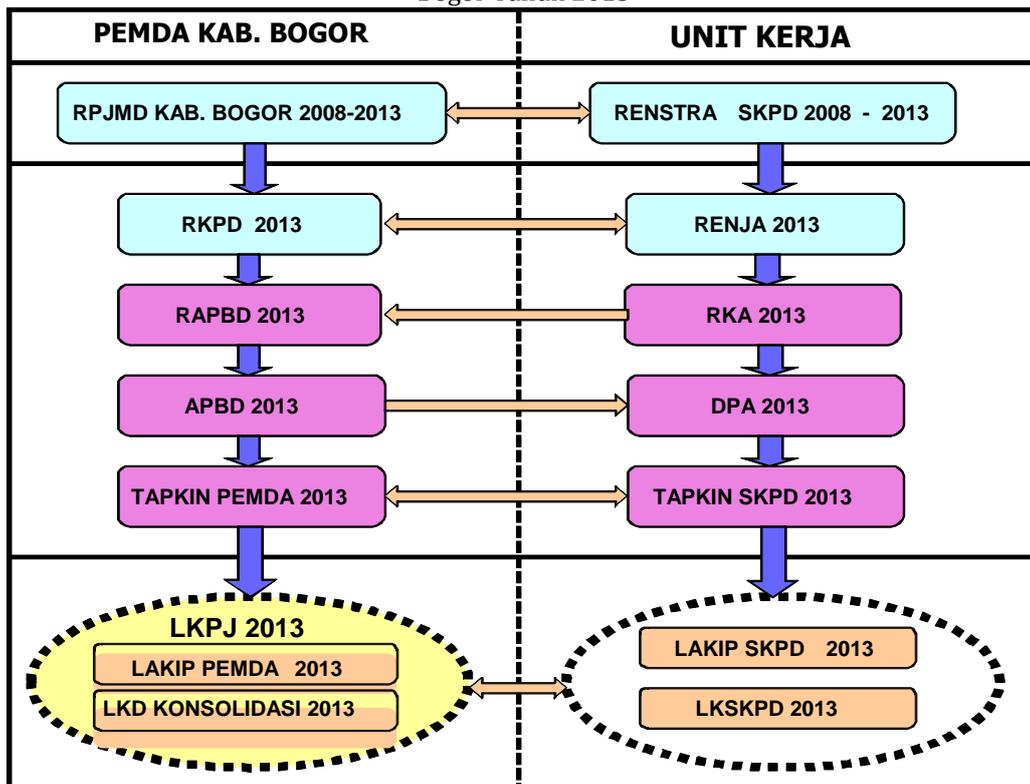
Sistematika LAKIP Kabupaten Bogor tahun 2013 disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Alur pikir penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bogor tahun 2013 dan keterkaitan dengan LAKIP Organisasi Perangkat Daerah (OPD) disajikan dalam gambar 1.4 berikut ini:

Alur pikir pengukuran kinerja pencapaian sasaran Pemerintah Kabupaten Bogor mengikuti alur pikir sebagaimana disajikan dalam gambar 1.3 berikut ini:

Gambar 1.3. Alur Pikir Pengukuran kinerja



Gambar 1.4. Alur pikir penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2013



Adapun sistematika dan ringkasan masing-masing Bab adalah sebagai berikut:

Ringkasan Eksekutif

**BAB I PENDAHULUAN**

Berisi uraian tentang Latar Belakang, Organisasi Pemerintah Kabupaten Bogor, Kondisi Ekonomi, Gambaran Umum Demografis, Sistematika Penyajian.

**BAB II RPJMD DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2013**

Berisi gambaran singkat mengenai RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2008-2013 dan Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2013, RPJMD menguraikan secara singkat pernyataan visi dan misi Kabupaten Bogor, Penetapan Kinerja menguraikan sasaran strategis Kabupaten Bogor tahun 2013.

**BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Berisi uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas pencapaian sasaran tahun 2013, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan/ kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-



langkah antisipasi yang akan diambil, Selain itu juga menyajikan akuntabilitas keuangan yang menyajikan alokasi dan realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Bogor tahun 2013.

#### **BAB IV      PENUTUP**

Berisi tinjauan tujuan secara umum tentang keberhasilan/ kegagalan, permasalahan dan kendala yang terjadi serta strategi pemecahan masalahnya.

